



► PENATAAN KAWASAN

Pengganti TM 2 Kelar Akhir Tahun

Yosef Leon

yosef@harianjogja.com

JOGJA—Gedung permanen tempat relokasi pedagang Teras Malioboro 2 (TM 2) mulai dibangun di Ketandan, Jogja.

Lokasi sementara TM 2 di utara Gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro, Jogja, nantinya akan difungsikan sebagai Jogja Planning Galery (JPG).

Total ada dua tempat yang disiapkan Pemda DIY untuk menampung para pedagang di lokasi yang baru itu.

Pertama, di area Ketandan tepatnya di belakang Ramayana Robinson, dan satunya lagi di belakang Teras Malioboro 1.

Plh Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Wisnu Hermawan, mengatakan proses pembangunan gedung baru tempat relokasi pedagang TM 2 itu sudah dimulai beberapa waktu lalu serentak di dua lokasi tersebut. "Jadi sekarang prosesnya sudah tahap konstruksi dan juga ada tahap pembangunan oleh pihak ketiga sesuai hasil lelang," katanya, Kamis (11/7).

Pengganti TM 2...

Sesuai kontrak, pengerjaan akan memakan waktu kurang lebih enam bulan atau sampai akhir tahun mendatang. Setelahnya Dinkop UKM DIY bakal melanjutkan ke tahap berikutnya dengan berkoordinasi bersama Pemkot Jogja. "Nanti kami lihat dulu harapannya tahun depan proses penempatan sudah bisa dicoba atau belum. Harapannya nanti semua tentu proses relokasi berjalan aman dan nyaman semuanya bisa dirembuk," katanya.

Adapun lahan tempat relokasi pedagang TM 2 itu yang berada di dua lokasi tersebut nantinya seluas 8.000 meter persegi. Pembangunan dirancang tidak semuanya penuh dengan bangunan, tapi juga disediakan fasilitas berupa ruang terbuka hijau dan lain sebagainya. "Masing-masing gedung baik yang di belakang Ramayana atau dekat Teras Malioboro 1 nantinya dibuat tiga lantai dengan anggaran mencapai Rp70 miliar," ujarnya.

Menurut Wisnu, gedung yang berlokasi di Jalan Ketandan akan dikonsepsi mengarah ke bangunan bercorak Tionghoa sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Sementara yang di dekat Teras Malioboro berkonsep bangunan *indische*.

"Kalau pembagian lapak itu dari Pemkot Jogja yang urus,

kami hanya menyediakan lokasi dan gedung," ujar Wisnu.

Minta Dilibatkan

Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro yang tergabung dalam paguyuban Tri Dharma meminta agar dilibatkan dalam proses relokasi PKL Teras Malioboro 2 oleh Pemkot Jogja dan Pemda DIY.

Ketua Tri Dharma, Arif Usman, menjelaskan PKL sampai saat ini tidak pernah dilibatkan dalam proses relokasi setelah menempati TM 2. "Kami tidak pernah dilibatkan dalam proses relokasi, tahu-tahu ada alat berat yang sudah membangun," katanya.

Menurutnya, terjadi putus komunikasi antara para PKL dengan pemangku kebijakan terkait dengan relokasi ini. Akibatnya, aspirasi dari para PKL pun tidak tersampaikan. "Tahu-tahu mau ditempatkan seperti ini. Kami kan manusia, kami harus punya *bargaining* [kemampuan menawar] juga. Di Teras Malioboro 2 [PKL] banyak yang tidak sejahtera. Kami dipindahkan ke tempat relokasi berikutnya dengan jaminan apa?" katanya.

Penataan Jalan Malioboro sebagai bagian dari Penataan Kawasan Sumbu Filosofi yang telah ditetapkan sebagai World Intangible Heritage oleh UNESCO

menurutnya masih terdapat persoalan mendasar, yakni minimnya partisipasi publik dan transparansi informasi khususnya bagi PKL.

"Kami PKL Malioboro selaku rakyat terdampak. Adapun dampak yang dirasakan oleh kami di antaranya pendapatan yang menurun [di Teras Malioboro], sarana infrastruktur yang tidak cukup memadai, adanya ketidakpastian dan simpang siur informasi," ungkapnya.

Relokasi dari Jalan Malioboro ke Teras Malioboro adalah sebuah pelajaran yang perlu dievaluasi agar relokasi selanjutnya adalah relokasi yang partisipatif dan transparan.

"Yang paling penting ialah relokasi yang menyejahterakan kami selaku PKL Malioboro yang telah puluhan tahun berdagang di Malioboro," kata dia.

Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, mengaku bersedia memfasilitasi dan menjembatani persoalan yang dihadapi oleh PKL Malioboro terkait dengan partisipasi publik dalam relokasi Teras Malioboro 2.

"Kami Komisi B Provinsi DIY siap menjadi fasilitator antara PKL Malioboro dengan pihak pemerintah terkait. Khususnya berkaitan dengan adanya keluhan tidak dilibatkan dalam kebijakan relokasi," ungkapnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005